



**SUMBER BERITA**

**MINGGU, 08 OKTOBER 2023**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## Dugaan Korupsi Jembatan Air Taba Terunjam B CS Disupervisi KPK

**BENGKULU** - Penyidikan ulang kasus dugaan korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Air Taba Terunjam B CS, dengan nilai kontrak Rp 49 miliar di Kejaksaan Tinggi Bengkulu masih terus berlanjut.

Bahkan penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejati Bengkulu sudah mengantongi estimasi kerugian negara dalam kasus ini. Namun estimasi kerugian Negara itu belum bisa disampaikan ke publik.

Lantaran ada beberapa hal yang dikaitkan dengan sisi keuangan yang sudah direalisasikan. Termasuk kondisi fisik di lapangan seperti apa.

Terbaru, seminggu terakhir penyidik Pidsus Kejati Bengkulu kedatangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan supervisi, untuk membahas proses penyidikan kasus tersebut.

"Masih lanjut itu, kemarin ada koordinasi dengan KPK dari supervisinya," kata Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH.

Ternyata kasus ini, melibatkan KPK sejak dimulainya penyidikan awal oleh penyidik Kejati Bengkulu. "Memang dari dulu (KPK, red). Yang disupervisi kemarin kita mendalami penyidikan," sampai Danang.

Meski masih dalam sprindik (Surat Perintah Penyidikan, red) umum, penyidik sudah banyak memeriksa saksi, termasuk rekanan penyedia material dan alat berat. Kemudian pihak dari Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu.

Bahkan diketahui, penyidik juga akan berkoordinasi dengan ahli konstruksi terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Kita perdalam lagi lah, dari ahli juga dari saksi lainnya, yang jelas Taba Terunjam, masih jalan," demikian Danang.

Penyidik juga berkoordinasi ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, untuk menghitung kerugian Negara dari proyek jembatan di Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2019 ini.

Ketika disinggung apakah proyek tersebut dengan nilai anggaran mencapai Rp 49 miliar lebih dari APBN kekurangan volume dan mutu, hal tersebut tidak dibantah oleh Danang.

Ia mengatakan memang penyidik sudah mengantongi perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan proyek tersebut.

"Banyak indikasinya, dari ketidakbenaran pelaksanaan itu. Yang pasti ada ketidaksusaian, mungkin di spesifikasinya, mungkin di volume," sampai Danang.

Berdasarkan data yang RB peroleh dari website <https://lpse.pu.go.id/eproc4/lelang/49356064/pengumumanlelang>, nama proyek tersebut yakni Penggantian Jembatan Air TB. Terunjam B. CS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu.

Diberitakan sebelumnya, proyek tersebut memang sudah berstatus Provisional Hand Over (PHO). Atau sudah serah terima pertama antara kontraktor pelaksana dengan Pejabat Pembuat Komitmen. Namun belum berstatus FHO, atau serah terima terakhir. Pengusutan yang dilakukan Kejari Benteng sampai pada tahap berkoordinasi dengan BPK. Pelaksanaan proyek tersebut adalah PT Asria Jaya berasal dari Pontianak. Proyek pergantian jembatan air Taba Terunjam ini dilakukan setelah putus yang disebabkan banjir besar yang melanda Kabupaten Benteng pada tahun 2019 lalu. Penggantian jembatan tersebut dengan menggunakan dana APBN yakni dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). (jam)